
Jurnal Akuntansi dan Manajemen**Vol.12, No.2, 2017, Hal. 115-138**

**STUDI EKSPLORATIF TENTANG POTENSI PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
BERBASIS WAKAF****Trisna Herlinda¹⁾, Randy Heriyanto²⁾***Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang**Email: trisna.herlinda@gmail.com¹⁾, heriyantorandy@gmail.com²⁾*

ABSTRACT

This study aims to look at the potential for the development of waqf-based universities in West Sumatra. This study begins with the problem of the magnitude of potential waqf in Indonesia, especially West Sumatra, which has not been managed optimally. This condition is a great opportunity for the education sector to be able to transform and develop waqf as a financing alternative to higher education. Waqf can be managed by producing and investing in real sector and investment in Islamic financial institutions. Many financing models can be done with waqf assets, but must pay attention to sharia-compliant principles. The research data was collected through in-depth interviews with several Islamic university leaders and various waqf stakeholders. The results of this study indicate that so far, no information has been obtained regarding the true potential of waqf in West Sumatra because the data collected from each waqf manager is still not optimal and requires a long time. But what needs to be done now is to optimize waqf management and increase socialization especially for money waqf.

Keywords: Financing, Higher Education, Endowments, Management Optimization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf di Sumatera Barat. Penelitian ini diawali dari permasalahan besarnya potensi wakaf di Indonesia khususnya Sumatera Barat yang belum dikelola secara optimal. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi sektor pendidikan untuk dapat mentransformasikan dan mengembangkan wakaf sebagai alternatif pembiayaan pada perguruan tinggi. Wakaf dapat dikelola dengan cara memproduksi dan menginvestasikan pada sektor riil maupun investasi pada lembaga keuangan syariah. Banyak model pembiayaan yang dapat dilakukan dengan harta wakaf, namun harus memperhatikan prinsip-prinsip sesuai syariah. Data penelitian dikumpulkan melalui *in-depth interview* dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi Islam dan berbagai *stakeholder* wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini, belum diperoleh informasi terkait potensi wakaf yang sesungguhnya di Sumatera Barat karena data yang dikumpulkan dari masing-masing pengelola wakaf masih belum maksimal dan membutuhkan waktu yang lama. Namun yang perlu dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan manajemen wakaf dan memperbanyak sosialisasi terutama untuk wakaf uang.

Kata kunci: Pembiayaan, Perguruan Tinggi, Wakaf, Optimalisasi Manajemen.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam persaingan di masa depan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa pendidikan adalah wadah yang tepat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Dalam mengunggulkan sumber daya manusia dan mengunggulkan individu-individu yang berkualitas tentu perlu mengoptimalkan pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan dan merasakan pendidikan agar mampu untuk bersaing dan tidak dibodohi di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu permasalahan sosial. Menurut Furqon (2012) beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia diantaranya adalah bangunan sekolah yang tidak memadai, anak-anak yang putus sekolah karena mahal biaya pendidikan, serta tenaga pengajar yang kurang fokus dalam

mengajar karena hanya sebagai guru honor. Ini mengandung makna bahwa permasalahan ini muncul pada dasarnya terkait dengan persoalan minimnya dana anggaran dan tidak memadainya alokasi dana yang dianggarkan (Daulay, 2013).

Pemerintah memang sudah memberikan biaya gratis pada anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan selama sembilan tahun, atau bisa dikatakan memperoleh pendidikan gratis sampai tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun itu saja belum cukup dalam mencerdaskan bangsa. Mereka hendaknya juga bisa menyicipi dan memperoleh gelar sarjana yang bisa didapatkan pada perguruan tinggi.

Dalam proses perekrutan tenaga kerja, pemberi kerja akan cenderung memilih pekerja yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari pada orang-orang yang masih berpendidikan rendah (Tadaro dan Smith, 2009 dalam Rahman, 2009). Sehingga banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran atau menjadi pekerja dengan gaji kecil diakibatkan rendahnya pendidikan. Salah satu harapan pemerintah dalam membangun bangsa yang cerdas dan unggul tersebut tersandung karena minimnya dana, walaupun anggaran dana pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Permasalahan tersebut harus dicari solusinya dan dibutuhkan suatu ide atau terobosan baru yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan baik dari dana pemerintah maupun dari dana sosial (Furqon, 2012). Selain itu, dibutuhkan kreatifitas dari pimpinan sebuah institusi dalam menggali sumber dana yang diperlukan dan memanfaatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Wahyuni, 2016).

Di dalam Islam, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan dana sosial, salah satunya yaitu melalui wakaf. Wakaf sangat berperan dalam masyarakat muslim. Dana wakaf merupakan suatu mekanisme perkongsian harta kekayaan seseorang dengan orang lain atau dalam ekonomi wujudnya, golongan yang memberikan harta kekayaan kepada orang lain yang mana dapat membantu mencapai pembangunan ekonomi sebuah negara (Rahman, 2009). Ide wakaf memang telah dipraktikkan secara luas di seluruh masyarakat muslim, dan wakaf juga bisa menjadi hal penting dalam memberikan dukungan keuangan dalam keberhasilan pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan (Mahamood dan Rahman, 2015). Apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang melimpah yang tersedia secara terus menerus (Zulfa, 2012).

Jika dikaitkan dengan peran wakaf untuk pendidikan, maka wakaf dapat digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan. Pihak lembaga pendidikan juga harus mampu untuk memanfaatkan harta wakaf tersebut secara terus menerus. Tidak hanya bersifat konsumtif namun dapat dikembangkan ke hal yang produktif, Sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai sesuai peruntukannya. Fakta sejarah juga menunjukkan salah satu tujuan keberadaan wakaf adalah untuk mengedukasi masyarakat secara mental, spiritual dan ekonomi (Mohsin, 2009).

Pada sebuah kegiatan di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015 yang bertema “Seminar Pendidikan Berbasis Wakaf” yang dihadiri oleh guru-guru besar, dijelaskan bahwa potensi wakaf untuk pembangunan masyarakat dan bangsa amat strategis. Wakaf dapat dijadikan solusi dalam mengatasi kesulitan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan dan sebagainya. Di Indonesia potensi wakaf sangatlah besar, ibarat raksasa yang sedang tidur dan harus dibangun. Pada akhir seminar dicontohkan sebuah Universitas di Mesir yaitu Al-Azhar yang mana dananya bersumber dari wakaf dan berhasil mengembangkan pendidikan

dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak yang datang dari berbagai pelosok dunia.

Zulfa (2012) dalam penelitiannya mengenai pembiayaan pendidikan tinggi berbasis wakaf memberikan suatu konsep yang bisa dijadikan model alternatif dalam praktik pembiayaan pendidikan yaitu konsep *school levy* yang didukung oleh pajak properti. Ini mirip dengan konsep *ziswa* yang jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Furqan (2012) bahwasanya wakaf bisa dijadikan sebagai solusi permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Selain itu, sebuah sektor pendidikan di Sahara Sub Afrika mampu didanai dengan wakaf dengan meniru model Universitas Al-Azhar (Yakubu dan Hassan (2015). Banyak juga di negara muslim lainnya yang sudah menerapkan konsep universitas yang dibiayai oleh wakaf seperti di beberapa universitas di Malaysia dan Turki. Mahamood dan Rahman (2015) menemukan bahwa wakaf sangat membantu dalam memberikan bantuan pendidikan di beberapa perguruan tinggi Malaysia dan Turki. Selain itu, wakaf juga bisa memperkuat kualitas akademik, karena mahasiswa dan staf pengajar yang masuk pada perguruan tinggi adalah orang-orang yang terpilih. Untuk itu, tidak ada salahnya jika lembaga pendidikan di Indonesia mengikuti jejak Universitas Al-Azhar dalam mengelola lembaga pendidikan berbasis wakaf. Hal ini bisa membantu lembaga pendidikan untuk lebih mandiri dan tidak tergantung dengan subsidi pemerintah saja.

Sumatera Barat merupakan daerah yang mayoritas masyarakat Islam dan sangat potensial dalam mengembangkan harta wakaf. Oleh karena itu, berdasarkan fakta diatas peneliti ingin mengeksplorasi peranan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan pada perguruan tinggi di Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata "*waqafa*" atau "*habasa*" yang bisa diartikan dengan menahan (Mansur dan Al-Arab, 1954 dalam Satrio, 2015). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Kahf, 2007 dalam Furqon, 2012).

Adapun Mu'allim (2015), mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu harta yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan. Sedangkan madzhab syafi'iyah yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia mengatakan bahwa wakaf merupakan harta yang berubah kepemilikannya menjadi milik Allah SWT, dimana wakif (orang yang berwakaf) tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta yang telah diwakafkan. Selain itu, wakaf tidak boleh ditukar atau dijual dengan alasan apapun sekalipun itu bangunan masjid yang sudah tidak layak pakai (Lasmana, 2016). Kedua pengertian ini sama-sama menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan harus ditujukan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh (Dahlan, 1997 dalam Mu'allim, 2015).

Berdasarkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002, didefinisikan sebagai:

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya dan pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum

padanya (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang mubah (tidak haram)

Sedangkan undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf juga menyebutkan definisi wakaf sebagai, “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Landasan Hukum Wakaf

Wakaf hukumnya sunnah sebagai bentuk sadaqah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya telah meninggal (Rohman, 2010). Para ahli fikih sepakat tentang kebolehan wakaf, karena wakaf merupakan aktifitas kebaikan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf memiliki landasan hukum dari Al-Quran dan hadist Nabi yaitu :

a. Al-Qur'an

Wakaf sebenarnya tidak disebutkan secara lengkap dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, wakaf bisa ditemui didalam ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik. Selain itu, wakaf juga bisa dilihat pada ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berderma dalam kebaikan. Salah satu ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah surat Ali 'Imran ayat 92 sebagai berikut:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali-'Imran ayat 92).

b. Hadist

Hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khatab ketika memperoleh tanah di Khaibar (Asqalani, 2006). Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya.

Diriwayatkan Abdullah ibn Umar RA, ia berkata: "Umar memperoleh tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk berkonsultasi tentang tanah tersebut, ia berkata: "ya Rasūlullah, aku memperoleh tanah di Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih bernilai sebelumnya dari pada tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan kepada ku?, Nabi SAW berkata: "jika engkau mau, engkau tahan (wakafkan) tanah tersebut dan sedekahkanlah hasilnya/manfaatnya". Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya diperbolehkan untuk memakandari sebagian hasilnya menurut yang makruf (H.R Muslim).

Hadist lain yang menunjukkan asal mula disyari'atkannya ibadah wakaf dan menyebutkan wakaf termasuk kedalam sedekah jariyah (Asqalani, 2006) sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang shaleh." (HR. Muslim 3084).

Tujuan Wakaf

Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nas* (hubungan dengan seseorang). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takaful-al ijtimai'y* (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat muslim dan wakaf sudah banyak mendanai kepentingan publik, seperti kuburan, masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, gudang, toko, pabrik, yayasan amal, pendidikan agama lainnya.

Sejarah telah menunjukkan bahwa wakaf bisa dimanfaatkan oleh berbagai institusi pendidikan yaitu masjid, universitas atau perguruan tinggi, perpustakaan, asrama dan lain-lain. Bahkan, sejumlah universitas berbasis wakaf telah didirikan dan terus berkembang. Beberapa universitas di Barat yang didirikan dengan konsep sumbangan dari publik adalah Oxford dan Cambridge di Inggris dan universitas Harvard dan Yale di Amerika Serikat.

Jadi secara umum wakaf ditujukan untuk mendapatkan sumber dana dalam memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Wakaf bisa membentuk karakter seseorang untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas dalam meraih ridho Allah SWT (Zaid, 1423 dalam Furqon, 2012) Apabila merujuk pada wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa dinasti Umayyah, Abbasyiah dan Mamluk, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat muslim. Hal tersebut tercermin dalam wakaf Abi Thalhah yang mewakafkan kebun Bairuha dan menjadikan hasilnya untuk orang-orang miskin dan sanak kerabat. Juga tercermin dalam wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan agar kebutuhan air masyarakat Islam dapat terpenuhi.
- b. Menyiapkan kekuatan dan sarana-sarana vital yang dapat memperkuat posisi umat Islam, dan melindungi diri mereka serta mempertahankan akidah dan agamanya. Tujuan ini tercermin dalam wakaf senjata yang dilakukan oleh Khalid ibnu Walid. Selain itu, wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kebun mukhairik yang mana keuntungan yang didapat dimanfaatkan untuk membantu keluarga dan membeli beberapa kuda perang.
- c. Tempat penyebaran da'wah Islam, tempat pelaksanaan syi'ar-syi'ar Islam dan tempat pengajaran bagi generasi Islam. Tujuan ini tercermin dalam wakaf masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu masjid Quba dan masjid Nabawi.
- d. Menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, fakir miskin dan tamu. Tujuan ini tercermin dalam wakaf rumah yang dilakukan oleh para Sahabat (Zaid, 1423 dalam Furqon, 2012)

Jenis-Jenis Wakaf

Berdasarkan tujuan peruntukannya, jenis wakaf terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri* (keluarga). Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang

juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Contoh wakaf khairi adalah harta yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri secara umum. Dalam wakaf khairi, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu. Misalnya wakaf masjid, maka si wakif boleh saja sholat di sana, atau wakaf sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

c. Wakaf Musytarak

Wakaf jenis ini disebut juga dengan wakaf campuran karena kombinasi dari wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ini ditujukan sebagian pemanfaatannya kepada keluarga (ahli) dan sebagian lagi kepada masyarakat umum (khairi). Misalnya seseorang ingin mewakafkan tanah pertanian. Dimana, sebagian dari hasilnya ditujukan untuk anak cucunya dan sebagian lagi untuk tujuan masyarakat miskin.

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan syara'. Menurut UU No 41 Tahun 2004, rukun wakaf ada empat, yaitu :

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Adapun syarat untuk seorang wakif adalah :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha' (ahli fikih) sepakat, seseorang boleh mewakafkan hartanya bila diberi izin oleh tuannya.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, dan tidak mampu dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Selain itu, wakaf oleh orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang belum mampu melakukan akad dan menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak Berada dibawah pengampunan

Orang yang berada di bawah pengampunan atau orang yang masih berada dibawah sokongan orang lain (wali/orang tua) dipandang tidak cakap untuk

berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi, wakaf yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. **Mauquf Big (Barang atau harta yang diwakafkan)**

Adapun jenis barang atau harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* (harta yang dapat digunakan secara normal tidak dalam keadaan darurat). Karena itu, Mazhab Hanafi memandang tidak sah mewakafkan:
 - (1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
 - (2) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
 Harta yang diwakafkan harus diketahui secara jelas sehingga nantinya tidak menimbulkan persengketaan. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak diketahui secara jelas. Misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, atau mewakafkan salah satu dari rumahnya. Kata sebagian disini tidak jelas seberapa besar yang akan diwakafkan sehingga akan timbul perselisihan diantara kedua belah pihak. Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil *nadzdir* dari benda yang diwakafkan.
- c. Milik *Wakif*
 Barang wakaf harus milik wakif ketika terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara *tabarru'* (perbuatan sukarela). Oleh karena itu, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah.

3. **Mauquf 'Alaih (Tujuan Wakaf)**

Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu, mauquf 'alaih haruslah dari pihak kebajikan. Para fuqaha sepakat berpendapat bahwa infaq wakaf sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran agama Islam (Haq, 2001 dalam Ulinnuha, 2015)

4. **Sighat**

Sighat adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah atau batalnya suatu akad wakaf. Oleh karena itu, wakif harus jelas, tegas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa (Haq, 2001 dalam Ulinnuha, 2015)

Peran Wakaf Dalam Dunia Pendidikan pada Dinasti Islam

Wakaf memiliki peranan dalam meningkatkan peradaban umat Islam melalui lembaga-lembaga wakaf yang berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Diantara lembaga-lembaga wakaf yang memiliki fungsi tersebut sebagai berikut:

1. Masjid-Masjid

Sejak awal sejarah Islam, umat Islam telah memberikan perhatiannya terhadap pembangunan masjid. Masjid bukan saja menjadi tempat untuk beribadah, akan tetapi menjadi pusat dakwah Islam, tempat penyiaran, pengajaran risalah Islam, bahkan tempat untuk membahas permasalahan-permasalahan politik dan sosial. Sebagian besar masjid didirikan dengan status wakaf. Masjid wakaf pertama kali

berdiri adalah masjid Quba, yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah, Setelah itu Masjid Nabawi yang didirikan tahun pertama hijriah, dan berikutnya bermunculan masjid-masjid wakaf pada masa Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani al-Abbas..

Beberapa universitas yang terkenal hingga sekarang yang berasal dari masjid seperti universitas Al-Azhar di Kairo, Universitas Al-Zaitunah di Tunis, dan Universitas Al-Qurawiyin di Maroko. Pada waktu itu, di masjid para ahli hadist membacakan hadist diatas bangku tinggi, dan membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus setiap pagi dan sore. Beberapa kelompok guru melakukan talqin bacaan Al-Qur'an kepada anak-anak kecil.

Bersamaan dengan peranan masjid sebagai pusat pengajaran dan dakwah Islam, di sekitar masjid berdiri asrama-asrama yang menampung orang-orang miskin ataupun penuntut ilmu yang berasal dari tempat yang jauh, yang dikenal dengan istilah rubath, khaniqah, zawayah dan khalawy (Al-Shalih, 2001: Furqon, 2012). Rubath awalnya merupakan tempat menampung pasukan-pasukan perang para ulama, para ahli fikih dan dokter, akan tetapi dengan perjalanan waktu rubath lebih dikenal sebagai tempat pendidikan dan pengajaran dari ulama yang tinggal dirubath tersebut.

Khaniqah merupakan bahasa persi (Iran) yang berarti rumah. Dibangun dengan desain seperti masjid akan tetapi tidak memiliki menara azan, rumah tersebut terdiri dari beberapa kamar untuk menampung orang-orang fakir dan musafir. Para ulama dan syeikh-syeikh pada masa itu memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman bagi orang-orang fakir dan musafir yang tinggal dikhanyah tersebut.

Zawaya adalah tempat belajar yang lebih kecil ukurannya dibandingkan khanyah. Biasanya di jalan-jalan atau di tempat kosong. Kebanyakan di sudut-sudut masjid, para ulama menyampaikan pelajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah di zawaya tersebut.

Khalawy merupakan tempat dibawah bangunan masjid yang digunakan untuk tempat pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu syari'ah. Tempat tersebut biasanya digunakan untuk shalat pada saat musim dingin. Dinamakan khalawy, karena syaikh dan santri-santrinya menyepi dari keramaian untuk menuntut ilmu (al-Shalih,2001: Furqon, 2012).

2. Al-Kutab

Al-Kuttab atau al-maktab merupakan tempat bagi anak-anak usia dini ataupun pemula yang ingin belajar membaca dan menulis, belajar Al-Qur'an,

dan dasar-dasar ilmu-ilmu agama. Pada masa bani Umayyah, al-kuttatb, diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan keluarga istana serta orang kaya, akan tetapi selanjutnya bermunculan al-kuttatb yang didirikan oleh para dermawan sebagai wakaf untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin. Ibnu Huqf mencatat dalam satu kota seperti Sicilia berdiri 300 al-kuttatb, yang dalam satu al-kuttatb menampung ratusan bahkan ribuan siswa (As-Siba'i, 1420: Furqon, 2012)

Ada beberapa al-kuttatb yang diperuntukkan untuk golongan anak-anak yang rendah dan anak-anak miskin seperti di Syam. Pada abad ke-6, di Kairo sudah mulai dibangun beberapa al-kuttatb untuk anak-anak yatim dan penguasa. Pada masa itu, diintruksikan untuk mendirikan al-kuttatb bagi anak-anak miskin. Ini sangat berperan dalam hal menggali ilmu agama dan memberantas buta huruf. Meskipun mereka kekurangan, melalui wakaf mereka bisa menikmati pendidikan.

3. Madrasah

Lembaga pendidikan berbasis wakaf yang juga memiliki peran dalam kemajuan peradaban umat Islam adalah madrasah. Berbeda dengan al-kuttatb yang ciri khasnya berdampingan dengan masjid, maka madrasah terpisah dengan masjid. Madrasah melakukan proses pendidikan dengan cara yang lebih formal, memiliki tingkatan-tingkatan dan batas waktu pendidikan. Proses pendidikan dibiayai dengan dana wakaf sehingga siswa-siswa dapat belajar dengan gratis. Biaya operasional madrasah seperti gaji guru dan alat-alat pengajar dibiayai dengan hasil wakaf.

Madrasah wakaf yang terkenal dalam sejarah Islam adalah madrasah al-Nizhamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Bani Saljuk Turki tahun 459 H. Tujuan pendirian madrasah ini menurut Nizham al-Mulk untuk mencetak pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa yang memiliki ilmu atas dasar akidah al-Sunnah. Karena madrasah inilah akhirnya mulai bermunculan madrasah lainnya diberbagai Negara.

Madrasah-madrasah tersebut mengajarkan fikih empat madzhab disamping ilmu-ilmu umum dan kedokteran. Selain itu, madrasah al-Shalahiyah di Halb yang didirikan Amir Shalahuddin Yusuf al-Dawadar, madrasah al-Ghiyats atau madrasah al-Malik Manshur di Mekkah, yang didirikan oleh al-Manshur Ghiyats al-Din tahun 813H. Ada juga madrasah-madrasah lain yang dibangun dan dibiayai operasionalnya dengan dana wakaf, seperti madrasah al-Mustanshiriyah di Baghdad, madrasah Sulthan Hasan, Jami' al-Azhar di Mesir, al-Zaitunah di Tunis, al-Qurawiyyin di Fes Maroko (al-Shalih, 2001: Furqon, 2012).

Sebagaimana diketahui, Jami' al-Azhar merupakan masjid sekaligus lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jauhar al-Shaqily (panglima pasukan Mu'iz li Dinillah al-Fathimy) pada tahun 359 H. Jami' al-Azhar mengalami perkembangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama yang tidak hanya mengajarkan fiqh mazhab Syi'ah akan tetapi juga fikih mazhab Imam-Imam yang empat. Telah banyak ulama-ulama terkenal yang belajar maupun mengajar di Jami' al-Azhar. Dengan demikian menjadi semakin jelas peranan wakaf dalam meningkatkan peradaban, karena wakaf memberikan dana untuk meningkatkan aktivitas ilmiah, meningkatkan budaya, memberantas buta huruf, dan membangun peradaban Islam yang humanis.

4. Maktabah

Lembaga berbasis wakaf lain yang memiliki peran dalam pembentukan intelektual umat Islam adalah maktabah atau perpustakaan. Maktabah tersebar hampir diseluruh penjuru dunia Islam sejak abad ke-4. Maktabah menjadi kiblat bagi penuntut ilmu karena membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan lewat buku-buku gratis.

Faktor Kesuksesan Pengelolaan Wakaf Masa Dinasti Islam

Wakaf pada masa dinasti Islam telah memainkan peranan yang sangat vital bagi kemajuan ilmu dan pendidikan pada masa itu. Semua fasilitas dan kebutuhan dunia pendidikan dapat dipenuhi dengan wakaf. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa bahkan pendidikan gratis untuk mengatasi masalah pendidikan yang mahal. Guru dan tenaga pengajar memperoleh gaji dari keuntungan wakaf. Para penuntut ilmu disediakan asrama bahkan dicukupkan kebutuhan hariannya sehingga dapat fokus dalam menuntut ilmu.

Faktor penting dibalik kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu adalah adanya kesadaran dan kedermawanan para penguasa untuk mewakafkan hartanya dan kebijakan penguasa dalam upaya mengembangkan wakaf. Apabila dilihat dibalik wakaf-wakaf yang terkenal pada masa itu, ada usaha penguasa dan orang-orang kaya yang dermawan dalam mewakafkan hartanya untuk pendidikan, atau minimal mereka menciptakan kebijakan yang dapat memajukan dan, mengembangkan wakaf. Nizam al-Muluk, ketika membangun madrasah, diantaranya madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu madrasah-Nizhamiyah, mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk pendidikan sebesar 600.000 Dirham setiap tahunnya. Pada masa dinasti Mamluk, pemerintah membuat kebijakan bagi lembaga pendidikan yang peserta didiknya melakukan pembayaran harus mendirikan lembaga pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, yatim piatu yang tidak mampu (Furqon, 2012).

Kesadaran berwakaf muncul dari kesadaran agama akan nilai pahala yang terus menerus apabila berwakaf dan nilai pahala yang besar bila membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi tauhid, moral dan etika telah mendorong orang untuk melakukan wakaf dan berpartisipasi dalam berbuat kebaikan (Mahammod dan Rahman, 2015) karena religiusitas mempunyai hubungan terhadap perilaku seseorang untuk melakukan amal (Youseff et al, 2011 dalam Maulida, 2013). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, ritual agama, sikap sosial keagamaan. Oleh karena itu, pada masa dinasti Islam religiusitas cukup tinggi, sehingga adanya kesadaran masyarakat dalam beramal.

Permasalahan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf, diantaranya: Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan Al- Khairat, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Sultan Agung (Unisula). Lembaga-lembaga pendidikan ini telah berhasil mendayagunakan harta wakaf yang dimiliki untuk pengembangan pendidikan dan telah berhasil membiayai operasional pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dari keuntungan yang diperoleh dari harta wakaf. Akan tetapi, satu catatan adalah lembaga pendidikan tersebut belum berhasil memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu atau membutuhkan.

Sisi sosial dari wakaf belum terlalu terasa, walaupun telah mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut Uswatun Hasanah dalam pidatonya yang dikutip oleh Furqon (2012), ada beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia:

- a. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf.
 Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan konsepsi fikih wakaf baru yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang tentang Wakaf, dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan dan manajemen wakaf.
 Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sehingga mengakibatkan banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah nadzhir yang mengelola kurang profesional dalam memproduksi harta wakaf. Guna mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsep fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nadzhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya.
- c. Benda yang diwakafkan dan nadzhir (pengelola wakaf).
 Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nadzhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak). Padahal, dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzhir. Di Indonesia masih sedikit yang profesional, bahkan ada beberapa nadzhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagiannadzhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

Konsep Dasar Pembiayaan Wakaf

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan merupakan pembelanjaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan beberapa pakar ekonomi menyebutkan bahwa pembiayaan adalah mengeluarkan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk mengembangkan modal pokok baik yang bersifat materi maupun sumber daya manusia (Dunya, 1984 dalam Furqon 2014)

2. Ketentuan Dalam Pembiayaan Wakaf

Ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pembiayaan wakaf, diantaranya adalah:

- a. Dilarang menggunakan harta atau uang yang diharamkan, atau bersumber dari suatu investasi dari proyek-proyek yang haram.
- b. Dilarang melakukan pembiayaan untuk harta dan proyek-proyek yang diharamkan. Misalnya, dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang memproduksi minuman keras.
- c. Pembiayaan tersebut harus bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Azuz, 2003 dalam Furqon, 2014)

3. Model Pembiayaan dengan wakaf

Ada beberapa jenis model pembiayaan wakaf yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

a. Murabahah

Murabahah adalah suatu akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu barang yang telah disepakati. Harga barang tersebut sudah ditambah oleh pihak lembaga keuangan dengan mengambil beberapa keuntungan yang mana sudah disepakati bersama dengan nasabah (Riva'i. et. all. 2008 dalam Furqon, 2014). Misalnya dalam hal tanah wakaf yang masih memiliki lahan kosong, kemudiannadzhir melakukan akad murabahah dengan pihak bank untuk membeli perlengkapan pertanian. Atas pembelian tersebut nadzhir akan membayar perlengkapan tersebut dengan keuntungan dari hasil pertanian yang akan dikelola.

b. Istishna

Istishna' adalah seseorang meminta orang lain untuk membuatkan suatu barang dengan menyebutkan sifat-sifat khusus (Ascarya, 2007 dalam Furqon, 2014). Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi menyebutkan bahwa istishna merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa istishna' adalah suatu akad yang terjalin antara pemesan pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang sebagai pihak ke 2. Misalnya seorang nadzhir melakukan istishna' dengan memesan beberapa pakaian seragam untuk anak didik sebagai penerima manfaat wakaf kepada tukang jahit, dan pembayaran akan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

c. Ijarah

Ijarah ini dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu (Riva'i. et. all. 2008 dalam Furqon, 2014). Misalnya seorang nadzhir memberi izin kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah bangunan diatas tanah wakaf yang bangunan tersebut bisa berupa rumah sakit, ruko, perkantoran dan lain-lain, kemudian disewakan oleh nadzhir. Hasil penyewaan tersebut akan dibayarkan kepada yang memiliki dana, apabila sudah menutupi modal dari pihak penyedia dana, maka bangunan tersebut berpindah menjadi milik nadzhir wakaf.

d. Mudharabah

Mudharabah disebut juga dengan penanaman modal, yaitu dengan menyerahkan uang kepada yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Mudharabah sama dengan akad bagi hasil yang mana pemilik modal akan menyediakan modal untuk suatu usaha kepada orang yang akan

mengelola usaha, jika memperoleh keuntungan dikemudian hari maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

e. Musyarakah

Musyarakah adalah keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Semua pihak yang melakukan kesepakatan sama-sama menyetorkan dana dan nantinya akan membagi hasil usaha sesuai kesepakatan bersama.

f. Muswat dan Muzara'ah

Model pembiayaan ini digunakan untuk wakaf tanah, misalnya dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk hal pertanian. Musaqat adalah kerjasama dalam perawatan tanaman tersebut (Syaifuddin, 2003 dalam Furqon, 2014), sedangkan muzara'ah adalah kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara lahan pertaniannya, dengan adanya imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Misalnya seorang nadzhir menyerahkan tanah kepada pihak pengelola pertanian untuk ditanami dan dipelihara, hasil dari pertanian tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan.

g. Sukuk/Obligasi Syariah

Sukuk atau obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang digunakan sebagai instrumen investasi yang diterbitkan oleh emiten (Dunil, 2004 dalam Ramli, 2010) kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN MUI No. 32 Tahun 2002). Misalnya, seorang nadzdir wakaf menerbitkan sertifikat penyewaan tanah dan menjualnya kepada masyarakat, namun di dalam sertifikat tersebut tercantum pernyataan investor mewakilkan kepada naddzir untuk membangun gedung dengan biaya yang telah disepakati. Kemudian si pengelola akan membayar biaya sewa dari hasil penyewaan kepada investor sesuai nominal dan waktu yang telah ditetapkan (Kahf, 2006 dalam Furqon, 2014).

h. Wakaf Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang sudah I publik. Ini merupakan keinginan dari wakif dalam memberikan saham miliknya untuk diwakafkan, dan hasil dari saham bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, keluarga atau kedua-duanya. Misalnya seorang wakif ingin mewakafkan 50% sahamnya. Maka hasil dari investasi saham yang dilakukan oleh si wakif bisa ditujukan untuk tujuan wakaf sesuai akad yang dilakukan oleh si wakif. Dari uraian di atas dapat dilihat, banyaknya model pembiayaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan wakaf, namun disini sangat dituntut para nadzhir untuk lebih cerdas dan teliti dalam memilih pembiayaan serta harus memperhatikan risiko agar dapat mengurangi kerugian.

4. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara, karena di dalam Islam negara wajib menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat yaitu, pendidikan kesehatan dan keamanan. Sejarah Islam juga mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad ke-4 Hijriah, para Khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan

prasarana seperti perpustakaan. Meskipun pendidikan merupakan tanggung jawab negara, tetapi Islam tidak melarang inisiatif rakyat khususnya bagi mereka yang mempunyai kekayaan yang lebih untuk berperan dalam pendidikan. Melalui wakaf, orang-orang kaya tersebut telah banyak membangun sekolah-sekolah dan beberapa perguruan tinggi.

Pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi dapat dibedakan atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal dimaksud untuk biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, atau disebut gaji dosen dan staf lainnya.
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan, diperlukan manajemen dalam pengelolaan biaya pendidikan. Howard (1981) dalam Wahyuni (2016) menyebutkan bahwa biaya pada perguruan tinggi biasanya berupa pembayaran dalam bentuk uang dalam mengoperasikan lembaga tersebut, termasuk biaya upah dan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, alat peraga bagi mahasiswa, pemeliharaan peralatan dan sebagainya.

Anggaran biaya pendidikan pada perguruan tinggi salah satunya berkaitan dengan insentif dan aturan dari kelembagaan perguruan tinggi sendiri untuk menghasilkan banyaknya kegiatan dari tahun ke tahun. Dapat diasumsikan mengenai pengaturan biaya pada perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. Tujuan kelembagaan yang ideal adalah pendidikan yang *excellence prestige* dan bersikap *influence*. Yang dimaksud *excellence* atau disebut *quality* suatu kelembagaan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: rasio karyawan dengan mahasiswa, penghasilan karyawan, jumlah doktor pada fakultas, jumlah buku di perpustakaan, fasilitas peralatan yang memadai dan kualifikasi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Kriteria-kriteria ini adalah input untuk menghasilkan unitcost dalam bentuk uang, dalam hal ini bukan sebagai outcome dari proses pendidikan.
- b. Yang dinamakan *excellence prestige* dan *influence* adalah tidak adanya batasan terhadap jumlah uang suatu lembaga yang bisa dimanfaatkan bagi lajunya pendidikan.
- c. Tidak ada perguruan tinggi yang pernah mengakui mempunyai cukup uang dan semuanya mencoba untuk meningkatkan sumber dana tanpa batas.
- d. Secara kumulatif tertuju pada peningkatan biaya pengeluaran.

Teori Perguruan Tinggi Wakaf

1. Konsep Perguruan Tinggi Berbasis Wakaf

Perguruan tinggi berbasis wakaf berarti sebuah perguruan tinggi tersebut didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip wakaf. Dana wakaf pada

sebuah perguruan tinggi dapat dimanfaatkan baik untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Ada beberapa tipe wakaf yang bisa digunakan, yaitu wakaf ahli, wakaf khairi dan wakaf musytarak (Mahammad dan Rahman, 2015). Wakaf ahli secara hukum Islam ditujukan untuk orang tertentu, contohnya wakaf yang diberikan kepada keluargawakif. Wakaf ini sangat baik sekali, selain kebaikan atas amal ibadah wakafnya, juga mendapatkan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diwakafkan. Sedangkan wakaf khairi lebih ditujukan untuk kepentingan umum, salah satunya untuk pendidikan, dan penerima manfaatnya tidak terbatas. Berbeda halnya dengan wakaf musytarak, yaitu gabungan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Contohnya seseorang mengatakan “Saya ingin mewakafkan 50% saham saya di reksadana untuk anak-anak saya dan sisanya adalah untuk masyarakat miskin”. Disini disebutkan bahwa ada dua jenis penerima manfaat, yaitu untuk anaknya dan sebagian lagi untuk orang miskin. Wakif tidak menyebutkan secara spesifik kriteria dari orang miskin, ini sama halnya ditujukan untuk masyarakat umum.

2. Regulasi Perguruan Tinggi Berbasis Wakaf

Regulasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi berbasis wakaf untuk memiliki aturan yang bisa mengatur sistem lembaga secara keseluruhan. Diantara aturan yang harus dijelaskan adalah karakteristik dan prinsip hukum Islam harus dijalankan untuk mengikat lembaga tersebut. Selain berpedoman pada hukum Islam, di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang wakaf yaitu UU No 41 Tahun 2004. UU ini bisa disebut sebuah karya hukum yang lahir dari hasil interpretasi kreatif atas norma-norma fikih wakaf yang berlaku selama ini. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pembentukan pengurus wakaf itu sendiri, orang-orang yang melaksanakannya harus amanah, memiliki kemampuan dalam mengelolanya agar manfaat dari wakaf bisa disalurkan sesuai tujuannya. Dalam pengelolaannya dibutuhkan pengawasan secara terus-menerus untuk mencegah penyalahgunaan dana wakaf. Berdasarkan uraian diatas, orang-orang yang terlibat dalam mengelola harta wakaf secara jelas tugas dan fungsinya harus dijabarkan dalam peraturan tersebut. Di dalam kitab Kasyaful Qana’ disebutkan, tidak sah wakaf diserahkan kepada orang yang tidak jelas, kepada orang yang mati, jin, budak, serta kepada bayi yang belum lahir karena wakaf butuh izin untuk memilikinya

Selain ketentuan untuk mengurus manajemen dan pengelolaannya, sangat penting dalam hal manajemen akunnya. Contohnya dalam pengelolaannya harus dipisahkan mana yang wakaf ahli dan mana yang wakaf khairi. Ini sangat penting diketahui oleh orang yang mengelola wakaf untuk menghindari salah tafsir karena jika salah dalam peruntukannya maka akan bertentangan dengan hukum agama. Dalam membuat aturan ini hendaknya lebih berpedoman kepada ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Akta Wakaf

Akta wakaf sangat penting dalam menentukan bagaimana pengelolaan harta wakaf. Dalam akta tercakup spesifikasi penerima manfaat, penggunaan harta wakaf, serta hal-hal lainnya yang menjadi keinginan wakif. Dalam konteks pendidikan akta wakaf bisaberupa visi dan misi dari perguruan tinggi, sistem dan kurikulum, persyaratan untuk seleksi dan kualifikasi dari dosen, mahasiswa dan staf yang akan masuk di perguruan tinggi tersebut.

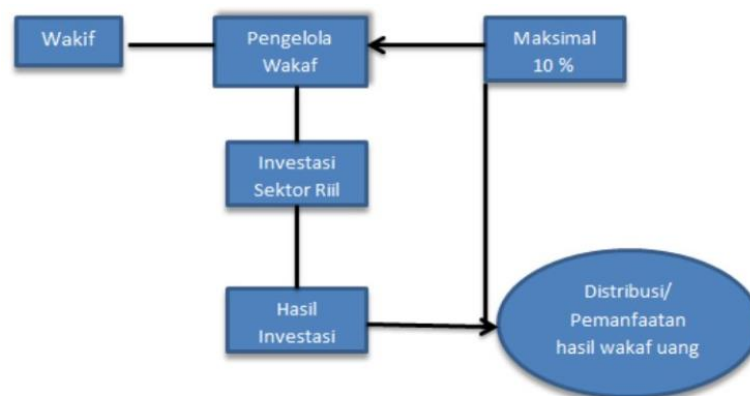
Seperti yang ditemukan di sebuah madrasah di Mesir dan Suriah. Pada masa Mumluk (1250-1517) wakif menentukan kondisi dan tujuan dari

madarasah. Mereka juga menetapkan kurikulum yang diajarkan, yaitu qur'an, fiqh dan hadist (Mahmood dan Rahman dalam Mahamid, 2015). Selama periode Mumluk juga menetapkan jenis kurikulum, tenaga pengajar, jadwal pelajaran sampai hari belajar juga dijelaskan dalam akta (Mahamid, 2012). Kemudian, dana wakaf yang diterima dari wakif harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya dalam bentuk hal yang lebih produktif, seperti melakukan investasi untuk memperoleh dividen, atau membeli harta tidak bergerak namun dimanfaatkan untuk tujuan wakaf. Untuk metode pembiayaan bisa dilakukan dengan menggabungkan beberapa konsep transaksi komersial Islam seperti REITs (Real Estate Investment Trust- Wakaf REITs), atau obligasi Islam (sukuk-wakaf sukuk). Dalam hal pemilihan mahasiswa dan dosen berdasarkan prestasi akademik. Hal ini akan memastikan bahwa perguruan tinggi tersebut dan produksi lulusannya berkualitas tinggi. Tidak hanya mahasiswa, dosen yang akan menjadi tenaga pengajar pada perguruan tinggi tersebut juga harus memenuhi kriteria yang baik dibidang akademik, khususnya dalam pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam mengelola wakaf, administrasi dan manajemen sangatlah penting, Orang yang menjadi nadzhir haruslah orang yang jujur dan berhati-hati dalam mengelola dana wakaf. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada Allah SWT tetapi juga kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada mereka yaitu para wakif. Oleh karena itu pengelola wakaf harus menjaga integritasnya. Menurut Acharya dan Dimson (2007) dalam Mahmood dan Rahman (2015), orang-orang yang dipilih harus bertanggung jawab dalam kegiatan amal, ditunjuk sebagai wali dan penerima manfaat dari yayasan.

Manajemen Investasi Wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk- produk syariah. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa investasi dapat dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor riil dan lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan investasi harus dijamin oleh lembaga penjamin sebagai bentuk pelestarian harta wakaf (Al-naway, 1997 dalam Maksum, 2010). Jaminan ini dapat dilakukan melalui asuransi syariah. Berikut adalah salah satu bentuk skema investasi wakaf uang melalui sektor riil.

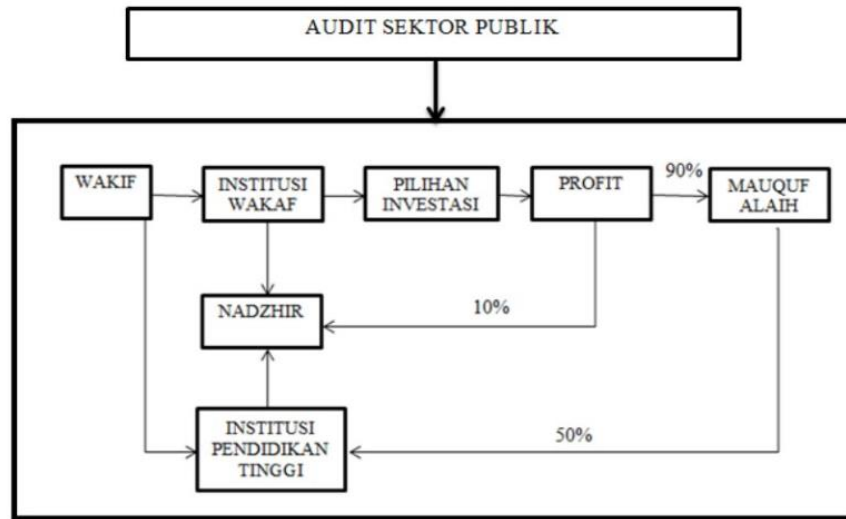


Gambar 1. Skema Investasi Wakaf Uang pada Sektor Riil

Sumber: Maksum (2010)

Sedangkan untuk model wakaf pendidikan yang terintegrasi juga digambarkan oleh Suparno (2016). Skema model wakaf ini menggambarkan bagaimana proses

pengelolaan wakaf yang diserahkan kepada institusi terlibat seperti nadzhir yang kemudian mengelolanya pada sektor riil maupun kegiatan bisnis lainnya. Dalam skema ini yang paling difokuskan adalah peranan audit sektor publik dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja dari pengelola wakaf. Skema tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Skema Model Wakaf dan Pendidikan Terintegrasi
Sumber: Suparno (2016)

Prospek Wakaf Dalam Pendidikan Modern

Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga baik orang miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka yang kurang mampu, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya (Hasan, 2011)

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, dalam database Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2008, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Belum lagi potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang (cash waqf). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dengan demikian, wakaf dalam syari'ah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* dimana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap dijadikan sebagai aset produktif. Dengan kata

lain, paling tidak secara teoritis, wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Maka tidak heran pada pemerintah Arab Saudi mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan atau *corporation*. Setelah berhasil dengan investasi harta wakaf dalam bentuk saham pada sebuah perusahaan pemborong bangunan dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, kementerian wakaf Arab Saudi berencana akan mengembangkan pengelolaan wakaf dengan sistem perusahaan secara lebih luas.

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya, sektor wakaf ini bahkan kadang-kadang disebut sebagai sektor ketiga (*third sector*) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta (Achsien, 2013 dalam Qomar, 2016)

Pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal baik pemerintah maupun swasta tetapi lebih didasarkan pada unsur kebajikan, kebaikan dan kerja sama. Oleh karenanya, agama menjanjikan pahala yang abadi bagi pewakaf (*wakif*) selama aset yang diwakafkannya masih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Aset yang diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal itu terlihat dengan adanya larangan untuk mengurangi aset yang telah diwakafkan dan membiarkan tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Artinya, harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap pokok atau produksinya, dalam mengembangkan harta wakaf secara terus menerus.

Menarik sekali kasus investasi wakaf masjid yang dikembangkan di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus. Kemajuan di bidang teknologi bangunan yang memungkinkan perluasan gedung secara vertikal semakin menambah nilai tukar tanah wakaf. Akhirnya muncul pemikiran untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti masjid yang pada waktu diwakafkan hanya terdiri dari satu lantai. Masjid-masjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama. Lantai satu digunakan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang pertemuan serba guna, dan begitu seterusnya. Semua itu, diolah dengan sistem profit yang menjamin pengembangan investasi wakaf. Dari situ terlihat jelas bahwa dari luas tanah wakaf yang sama dapat diperoleh pemasukan yang bermacam-macam dalam contoh di atas adalah pemasukan dari balai pengobatan, penyewaan ruang pertemuan, dan sebagainya (Hasan, 2011)

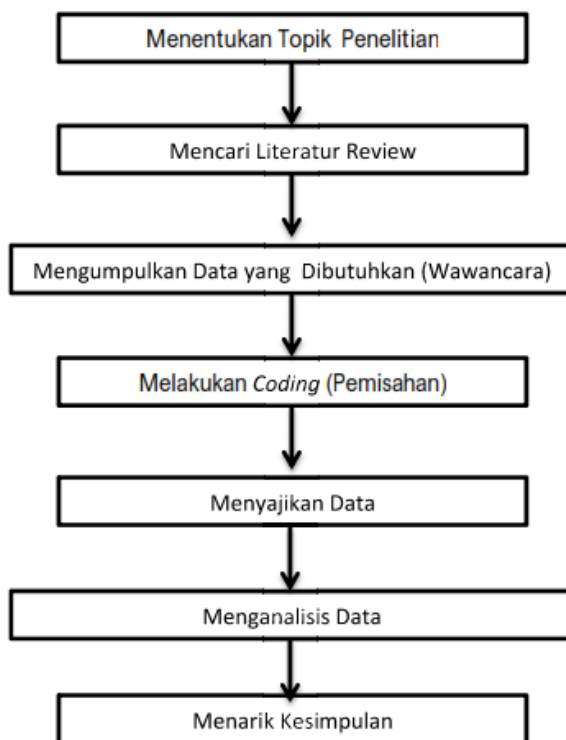
METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan secara mendalam tentang potensi pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf di Sumatera Barat dengan melakukan wawancara kepada pengelola tiga perguruan tinggi dan beberapa stakeholder utama lainnya. Kemudian data dianalisis untuk dikembangkan dalam bentuk manajemen pembiayaan perguruan tinggi berbasis wakaf.

Alur penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. Dalam melakukan penelitian, data yang digunakan adalah data primer dengan beberapa informan. Ada tujuh tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini. Pertama, menentukan topik penelitian tentang potensi pengembangan perguruan

tinggi berbasis wakaf. Kedua, mencari literatur review yang berhubungan dengan wakaf dan pembiayaan perguruan tinggi berbasis wakaf. Ketiga, mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan membuat transkrip. Keempat, melakukan *coding* (pemisahan atau pemilahan) dari transkrip wawancara sesuai informasi yang dibutuhkan. Kelima, menyajikan data berdasarkan temuan-temuan yang didapat ketika melakukan wawancara. Keenam, menganalisis data dan menambahkan beberapa rekomendasi dan ketujuh yaitu menarik kesimpulan.



Gambar 3. Bagan Alur Penelitian

Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi subjek sekaligus informan adalah beberapa pimpinan perguruan tinggi berbasis Islam di kota Padang dan para stakeholder dari wakaf itu sendiri. Dasar pemilihan perguruan tinggi pada penelitian ini adalah karena kesediaan perguruan tinggi dalam memberikan informasi dan kemudahan untuk diakses. Adapun informan dari perguruan tinggi tersebut adalah rektor IAIN Imam Bonjol, Wakil Ketua 1 STAI-PIQ Sumbar dan Kepala Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).

Sedangkan informan dari stakeholder dipilih berdasarkan pemahaman informan tentang informasi yang peneliti butuhkan serta kesediaan dalam memberikan informasi, diantaranya adalah nadzhir, yaitu orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai tujuan wakaf tersebut, dan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pengelola wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya. Pada penelitian ini wakif adalah seseorang yang mewakafkan hartanya di wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Selanjutnya pihak regulator, yaitu orang yang bertugas di Badan Wakaf Indonesia yang bertanggungjawab pada bidang pengembangan wakaf. Sedangkan dari akademis, yaitu salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). Adapun dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin melihat dan mengetahui potensi pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf di Sumatera Barat yang kemudian dikembangkan dalam bentuk model pembiayaan perguruan tinggi wakaf. Sedangkan ditinjau dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif (*explorative research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya (Kuncoro, 2009).

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan para pimpinan perguruan tinggi dan *stakeholder* secara langsung.

METODE ANALISIS

Data yang peneliti kumpulkan tidak ada artinya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena analisislah data tersebut menjadi berguna dalam memecahkan suatu masalah (Mulyani, 2012). Janice (1999) dalam Widodo (2015) mengungkapkan bahwa proses analisis data kualitatif terdiri dari membaca dan mempelajari data kemudian menandai kata-kata kunci yang ada dalam data, memahami kata kunci tersebut dan menemukan tema, membuat model yang ditemukan dan melakukan *coding* (pemisahan atau pemilahan). Salim (2006: 22-23) menyebutkan langkah-langkah dalam pengelolaan data ada tiga, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Pada saat pengumpulan data beralangsur analisis sudah mulai dilakukan sampai data selesai dikumpulkan pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari dengan melanjutkan pertanyaan jika jawaban yang diberikan masih belum memuaskan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah melakukan wawancara peneliti membuat transkrip wawancara dengan menuliskan hasil wawancara yang ada pada rekaman, kemudian peneliti membaca kembali secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengambil dan mengelompokkan informasi yang diberikan oleh informan sesuai konteks penelitian dan mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapat inti kalimatnya saja, tetapi bahasa sesuai bahasa informan kemudian mendeskripsikan kumpulan-kumpulan informasi untuk ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Informan peneliti terdiri dari tiga pengelola perguruan tinggi dan beberapa *stakeholder* utama dari wakaf. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, secara keseluruhan maksud dan tujuan dari jawaban yang diberikan adalah sama. Untuk sumber pembiayaan pada perguruan tinggi yang berstatus negeri sepenuhnya berasal dari pemerintah, dan yang perguruan tinggi yang bersatus swasta pada umumnya hanya mengandalkan dana dari mahasiswa dan yayasan.

Untuk potensi pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf di Sumatera Barat sangat besar, namun karena kurangnya kemampuan dari pengelola dalam mengembangkan harta wakaf, mengakibatkan masih banyak harta tersebut yang menganggur. Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan wakaf uang dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan harta wakaf yang potensial bisa

diproduktifkan. Gagasan ini tidak akan dapat berjalan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak diantaranya ulama, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Instansi Pendidikan, dan masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan nadzhir yang profesional dan memiliki keahlian dalam mengembangkan harta wakaf. Banyak model pembiayaan yang dapat dilakukan dengan harta wakaf, namun nadzhir juga harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi agar tidak mengalami kerugian. Maka dalam memilih suatu investasi harta wakaf diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga penjamin syariah (LPS) agar dapat memantau perkembangan dari investasi.

KESIMPULAN

Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional. Banyak manfaat yang diberikan oleh wakaf terutama dalam bidang pendidikan dengan cara memproduksi harta wakaf dengan pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Namun hal utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengelola dan mengembangkan wakaf uang, karena dengan wakaf uang dapat membantu dalam menggerakkan harta wakaf lainnya yang menganggur. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan dukungan beberapa pihak seperti ulama, institusi pendidikan, pemerintah dan masyarakat.

Untuk perguruan tinggi banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengembangkan harta wakaf, salah satunya dengan melibatkan mahasiswa dalam pengelolaannya. Selain meningkatkan solidaritas pada jiwa mahasiswa, dengan dibekali ilmu kewirausahaan sesuai syariah maka akan membantu mereka dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga nantinya keuntungan-keuntungan yang didapat bisa diarahkan kembali sesuai pemanfaatan wakaf.

Dalam melakukan manajemen investasi wakaf dapat diarahkan melalui sektor riil dan investasi melalui bank syariah. Sektor riil ini dapat disalurkan untuk membiayai usaha kecil masyarakat dan sebagainya. Sedangkan investasi melalui bank syariah dalam operasionalnya sudah mengacu pada ketentuan Al-quran dan hadist. Namun demikian, dalam melakukan investasi pada harta wakaf ada dua hal yaitu pokok wakaf tidak boleh habis dan investasi tersebut harus mendatangkan hasil. Oleh karena itu, jika nadzhir ingin melakukan investasi harus ada jaminan untuk menghindari kerugian. Salah satu yang dilakukan adalah dengan kerja sama dengan lembaga penjamin syariah (LPS).

Sampai saat ini belum diperoleh informasi terkait potensi wakaf yang sesungguhnya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena sedikitnya data yang didapat dan ditambah lagi laporan untuk harta wakaf di BWI SUMBAR dari pengurus lama ke pengurus baru belum ada. Untuk saat ini, hal yang bisa dilakukan adalah sosialisasi tentang wakaf lebih diperbanyak dan merata terutama kepada lembaga pengelola dan berbagai lapisan masyarakat. Kemudian pentingnya kejelasan fungsi dan peran lembaga dari pengelola wakaf khususnya BWI. Jika manajemen wakaf ini sudah optimal dijalankan, maka sangat potensial dalam pengembangan pembiayaan perguruan tinggi berbasis wakaf di Sumatera Barat.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih menggali secara mendalam tentang potensi pengembangan pembiayaan perguruan tinggi berbasis wakaf dengan melihat aset wakaf yang ada di Sumatera Barat.

Kemudian menambah persepsi atau pandangan dari segi ulama secara fiqih tentang pembiayaan ini, sehingga eksplorasi dari pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf semakin jelas dan lebih kompleks.

2. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf:
 - a. Harus ada koordinasi antara pemerintah, ulama dan lembaga-lembaga terkait guna meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf tunai dalam mewujudkan potensi wakaf tunai secara maksimal. Karena pengelolaan wakaf tunai baik pada Bank Syariah maupun di kelola oleh lembaga swasta, masing-masing memiliki keunggulannya sendiri.
 - b. Diperlukan upaya sosialisasi tentang perwakafan secara lebih menyeluruh dan merata terutama kepada lembaga yang mempunyai potensi untuk mengelola wakaf tunai, agar wakaf tunai ini dapat segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
 - c. Segera melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi dan peran lembaga perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia dengan melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam.
 - d. Perlu segera melengkapi perangkat hukum, serta peraturan lain yang mengatur tentang wakaf khususnya wakaf tunai, yaitu Peraturan Daerah (Perda) agar aturan yang ada semakin jelas dan lebih diperkuat.
 - e. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, maka pengelolaan dana tersebut perlu diarahkan pada sektor usaha produktif dengan menjalin kerjasama (networking) dengan lembaga usaha yang telah memiliki reputasi yang baik. Sehingga dana segar yang dihimpun dapat terus memberikan manfaat dan terus berkembang.
 - f. Lembaga pendidikan selain mempunyai tugas untuk mendidik, dapat juga memainkan peranan dalam membantu pemerintah mensosialisasikan perwakafan beserta perangkat hukum yang mengatur tentangnya, khususnya wakaf tunai kepada kalangan akademisi. Dengan demikian pola penyadaran dan penyebaran konsep wakaf tunai akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M (2015). *Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root*, *Jurnal of Islamic Finance*, Vol.4 . No.1
- Ahmad. M. & Hassan. Y. B (2015). *Funding the Sub-Saharan African Education Sector with Waqf: Experiences from al-Azhar University and Selected Universities in Malaysia* *Journal of Creative Writing*, Vol.1 Iss.4. pp. 40-54.
- Aqsalani, I. H. (2006). Terjemahan Buluqhul Maram, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh Hasan, (Bandung: CV.Peberbit Diponegoro) Hal. 410.
- Arif, M.N. R (2012). Efek Multipler Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46, No.1
- Arifin, A.S (2015) Kecendrungan Global Pendidikan Tinggi dan Pergeseran Paradigma Reformasi Pendidikan Tinggi Pada Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Vol.6, No.2 .
- Daulay. N. K.(2013). *Managemen Konflik Dalam Pengelolaan Pembiayaan Perguruan Tinggi*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an PDF dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah 1989), 87
- Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002.
- Furqon, A. (2012). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan- Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia .Jurnal Hukum Islam. 10, (1), 35-52.
- Furqon, A. (2014), Model- Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. Jurnal economica. Vol 5(1)
- Hasan, M (2011). Peranan Wakaf Dalam Pendidikan. <https://amalshaleh.wordpress.com/2011/02/16/peranan-wakaf-dalam-pendidikan/> (Diakses tanggal 15 Juni 2016)
- Kamal, M (2015), Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syaafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15 (1), 93-110
- Kasdi, Abdurrahman (2016), Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan, STAIN Kudus, Jawa Tengah, Vol. 11, No.1
- Kuncoro, Mudrajat (2009). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Lasmana, N (2016). Wakaf Dalam Tafsir Al- Manar (Penafsiran atas Surat AlBaqarah ayat 261-263 dan Ali-Imran ayat 92. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.02, No.01
- Laldin, M.A (2012). *Waqf in education funding: The experience of the International Islamic University Malaysia in Managing Endowment (Waqf) Fund. ISRA – Journal.*
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 17
- Mahamid, H. (2012). *Study Days and Vacation In Madrass of Medieval Syria, Educational Research Journal Vol. 2(7), pp. 231 – 238* Mahamid, H. (2013), *Waqf and madrasas in late medieval Syria, Educational Research Journal Vol. 8(10), pp. 602-612*
- Mahamood. S. M & Rahman. A. Ab (2015). *Financing Universities though waqf, pious endowment : is it possible ? Humanomics*. Vol. 31 Iss.4 pp.430-453
- Maksun, Muhammad (2010). Managemen Investasi Wakaf Uang. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maulida, Sri (2013). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta. Jurnal Eknonomi Syariah Indonesia. Vol 3(1)
- Meleong. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosda Karya.
- Moleong (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda karya, h. 332.
- Mohsin. A (2009). *Family Waqf : its origin, law prospects .in Proc. International Conf. on Waqf Laws and Management: Reality and Prospects, International Islamic University Malaysia*, Kuala Lumpur, 2009, pp. 3-6.
- Mua'allim, Amir (2015). Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Indonesia. Akademika, Vol.20 (1)
- Mulyani, D.S (2012). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Universitas Pendidikan Indonesia
- Nanang Fattah. (2004). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2015
- Qomar, N (2016). Konsep Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam
- Rahman.A.Ab. (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. Jurnal Syariah. 17, (1), 113-152
- Ramli, M.R (2010). Obligasi Sukuk. Islamic Studies. Ekonomi Islam
- Rochman .M(2010). Wakaf Menurut Islam. <http://digilib.uinsby.ac.id/8545/5/bab%202.pdf> (Diakses tanggal 15 Juni 2016)
- Rozalinda (2012). Managemen Resiko Investasi Wakaf Uang. Islamica , Vol. 6, No.2

- Rusydi, M (2015). Potensi Pengembangan Wakaf Uang di kota Palembang (Preliminary Research). I-Finance, Vol. 1, No.1
- Sabarguna, B.S. (2005) Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif Cet 1, (Jakarta: UI Press)
- Salim, Agus (2006), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Satrio, Dono (2015). Perbandingan Model Pengelolaan Wakaf Uang di Bangladesh dan Indonesia. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Sugiono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Alfabeta: Bandung)
- Sula, M. Syakir. 2009. Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah, dalam Jurnal Al Awqaf, Vol. II, No.2
- Sunan Abu Dau, Kitab Sembilan Imam Hadist, No . 2493. Lidwa pusaka i-software
- Suparno, Chandra (2016) Optimalisasi Model Manajemen Wakaf: Peran Pendidikan Tinggi dan Audit Sektor Publik. Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 31, No.2
- Syaiful Sagala (2010). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Ulinnuha (2015). "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wahyuni, Indah. (2016). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Serta Problematikanya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember
- Widodo (2015). Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. <http://widodoiain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalampenelitian.html>. [online]. Diakses tanggal 2 Oktober 2016.
- <http://www.pusatalquran.com/2014/04/keutamaan-wakaf.html> (Diakses Tanggal 14 Agustus 2016)
- Zulfa. U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Lev y. 22(2).
- Zulfa, U.(2016), Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa – School Levy (Studi di MI Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap) Vol.3(1).